

BAB III

DINAMIKA KONFLIK DI SAHARA BARAT ANTARA GERAKAN FRONT POLISARIO DENGAN MAROKO

Bab ini menggambarkan tentang bagaimana dinamika Front Polisario dalam konflik Sahara Barat, Sejarah Konflik dari masa ke masa dan bagaimana perjuangan warga Front Polisario dalam usaha menuntut kemerdekaan dari Maroko. Akan dijelaskan Sebab-sebab Konflik, Dampak-dampak Konflik sehingga mereka sangat yakin ingin merdeka dari Maroko dengan terpisahnya warga Sahara dari keluarganya oleh dinding pembatas kira-kira 2700 km, dan telah menewaskan 100 jiwa warga Sahara dan Eskalasi Konflik yang terjadi dari tahun 1991 hingga 2007.

Wilayah Sahara Barat memiliki sejarah yang panjang dimana menjadi sebuah wilayah yang diperebutkan karena kekayaan mineralnya dan ikan di perairannya. Sehingga, Sahara Barat selalu berada dibawah kekuasaan Negara Maroko. Berdasarkan keputusan *International Court of Justice* yang memberikan hak penentuan nasib sendiri pada penduduk di Sahara Barat. Keputusan tersebut tidak mendukung klaim terhadap wilayah Sahara Barat dari Maroko dan Mauritania. Sehingga Sahara Barat meminta bantuan kepada PBB sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik antara Front Polisario dengan Maroko.

A. Sejarah Konflik

Sahara Barat adalah sebuah provinsi yang dijajah sejak awal oleh Spanyol hingga tahun 1975. Sahara Barat memiliki jumlah penduduk urutan ke-182

267.405 (perk. Juli 2004) 1/km². Dimana 90 persen penduduknya adalah warga Sahrawi.

Keputusan *International Court of Justice* tahun 1975 yang memberikan hak penentuan nasib sendiri pada penduduk di Sahara Barat, sehingga Sahara Barat berhak memiliki parlemen dan kepala eksekutif serta mengelola keuangan, kebudayaan, pendidikan dan bahasa sendiri. Dengan posisi ini secara de facto Sahara Barat merupakan Republik Demokratis Arab Sahrawi akan tetapi pada kenyataannya Sahara Barat tetap menjadi Negara yang belum memiliki Negara mereka seutuhnya.

Masyarakat Sahara Barat dikenal dengan masyarakat Sahrawi. Wilayah Sahara Barat sangat menggiurkan karena kaya akan fosfat dan ikan diperairannya, tidak salah jika wilayah tersebut selalu menjadi incaran Negara-negara lainnya karena tergiur dengan kekayaan alamnya.

Pendudukan wilayah Sahara Barat mendapat tentangan dari kelompok yang menamakan dirinya "*Front Polisario*" (*Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro* – cat. 'Saguia el Hamra y Rio de Oro' dari kata Spanyol) yang artinya sebuah kelompok liberal yang populer di Sahara Barat yang menuntut wilayah tersebut sebagai tanah air mereka. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi ini adalah gerakan pembebasan Sahara Barat (separatisme) yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol, bukan irredentisme keinginan lepas dari Maroko dan bergabung dengan Aljazair. Gerakan Polisario mendapat dukungan yang sangat besar dari rakyat setempat. Kuatnya dukungan masyarakat atas

organisasi ini menyebabkan tentara Spanyol angkat kaki dari Sahara Barat, dua tahun berikutnya yaitu tahun 1975. Pada Desember 1975, Spanyol mengumumkan untuk meninggalkan Sahara Barat, daerah jajahannya sejak tahun 1848.

Dengan demikian, berakhir sudah perjuangan kaum gerilyawan Sahara Barat yang tergabung dalam gerakan pembebasan Polisario. Polisario kemudian memproklamkan berdirinya Republik Demokratik Arab Sahara atau Sahrawi (SADR). Sahara Barat sebagai territorial dispute antara Maroko, Aljazair, dan Front Polisario. Dengan berdirinya SADR, ternyata belum mengakhiri masalah yang harus dihadapi Sahara Barat. Sebab dalam masa-masa genting itu, rezim diktator Spanyol mengadakan kesepakatan rahasia dengan tetangga koloni yang ditinggalkan. Spanyol yang telah terusir dari Sahara Barat menyerahkan koloni tersebut pada Maroko dan Mauritania dengan imbalan tertentu termasuk mengesplotasi ikan di lepas pantai dan menambang fosfat. Rakyat yang tidak mau bergabung dengan Maroko kemudian terpaksa mengungsi di area yang dikuasai Polisario, tentara gerilya pengungsi. Mereka adalah orang-orang Sahrawi. Penduduk asli yang selama puluhan tahun menjadi warga kelas dua ditanahnya sendiri. Kesepakatan rahasia tersebut menjadi alasan Maroko menganeksasi Sahara Barat dan mengklaim bahwa kawasan itu adalah bagian dari wilayahnya.

Meskipun Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, menyatakan bahwa invasi Maroko itu melanggar hukum, namun Maroko tetap tidak bersedia mundur dari wilayah itu. Akhirnya kembali pecah perang di Sahara Barat. Puluhan ribu orang melarikan diri dari kekerasan perang. Bahkan 170 ribu orang

Sahrawi, sampai kini masih tinggal di kamp pengungsi di Aljazair dalam kondisi buruk. Pada tahun 1991, sebagian besar kawasan ini dikuasai oleh kerajaan Magribi (Maroko), dan SADR di bagian-bagian yang lain. Kemudian apakah daerah ini merupakan bagian dari Maroko atau milik Republik Demokratik Arab Sahrawi masih dipertentangkan. Saat ini Sahara Barat diduduki oleh Maroko, namun klaim ini tidak diakui secara global.

Organisasi pembebasan Polisario masih berjuang untuk kemerdekaan daerah ini. Adapun Mauritania, akibat tekanan sejumlah pihak luar menarik diri dari Sahara Barat pada tahun 1979. Sedangkan Aljazair yang juga tertarik atas Sahara Barat mulai melihat kemungkinan intervensi ketika banyaknya pengungsi daerah itu yang mengungsi ke wilayah Aljazair memberikan dukungan pada SADR namun tetap menghindari konflik dengan Maroko, walaupun selanjutnya hubungan Aljazair dan Maroko menjadi cukup tegang.

B. Sebab-Sebab Konflik

Konflik yang terjadi di Sahara Barat disebabkan beberapa faktor, misalnya saja dilihat dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Sahara Barat sangat besar dikarenakan wilayahnya yang subur.

Dari teori Johan Galtung dalam upaya memahami lahirnya konflik memperkenalkan sebuah teori sederhana. Teori ini mengasumsikan konflik dalam dimensi Attitude (A), Behavior (B) dan Contradictions (C) yang membentuk konflik.³⁰

³⁰ Teori abc Johan Galtung surwandono diunduh, 27 Oktober 2010

Akan tetapi sebelumnya penulis akan memaparkan pengertian dari arti konflik itu sendiri, Menurut Johan Galtung konflik adalah kondisi ketidaksesuaian/kontradiksi antara beberapa pihak yang berbeda kepentingan (tujuan).³¹ Maka tujuan dari penguasaan Maroko terhadap Sahara Barat inilah yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Attitude, konflik cenderung diawali dengan performa sikap dalam memandang pihak lain. Pihak lain diyakini sebagai “pengganggu” kepentingan yang akan merusak pencapaian tujuan kelompok tertentu.

Fenomena ini relatif sudah terbangun dalam sejarah Sahara Barat, bahwa Sahara Barat sebagai daerah pertemuan peradaban Islam, di Afrika Utara dan sudah sangat memahami bagaimana membangun multikulturalisme. Sehingga faktor Attitude dalam konteks konflik di Sahara Barat relatif tidak signifikan jika dilihat dari konstruksi sosial di Sahara Barat.

Dalam konteks psikologi sosial, behavior merupakan bentuk aksi dari sikap mental seseorang dalam merespon sesuatu.. Artinya jika dalam konteks attitude, konstruksi sejarah di Sahara Barat tidak problematis maka perilaku konflik di Sahara Barat juga bukan menjadi tradisi besar. Bahkan jika kita amati secara seksama, hubungan baik yang telah dilakukan oleh Sahara Barat dapat membuatnya diakui oleh beberapa Negara.

Lantas mengapa justru menimbulkan permasalahan besar dengan wilayah Sahara Barat yang Maroko sangat antusias ingin menguasainya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari intervensi kekuatan asing yang memancing air keruh dalam

³¹ <http://www.teorikonflik.com> diunduh, 27 Oktober 2010

konflik ini. Inilah yang mendominasi untuk Maroko tetap bertahan dengan keinginannya untuk menguasai Sahara Barat.

Menurut analisa penulis konflik di Sahara Barat disebabkan oleh variable kontroversi maka upaya mendinginkan konflik di Sahara Barat adalah dengan mengurangi derajat kontroversi yang ada, sehingga akan sekaligus menghambat kepentingan politik yang berkembang di Sahara Barat.

Saat ini, Maroko memiliki rencana untuk memberikan status otonomi kepada Sahara Barat yang bersandar pada kedaulatan Maroko, karakteristik sosial budaya Sahara Barat dan kriteria internasional untuk otonomi. Untuk menggalang dukungan terhadap rencana ini, Maroko melakukan pendekatan ke berbagai negara. Rencana ini ditolak oleh Front Polisario yang menginginkan referendum di Sahara Barat.

Proposal Maroko juga banyak mendapat tentangan dari dunia internasional karena dianggap sebagai "*a dangerous precedent*" yang mengancam sistem hukum internasional pasca PD II. Tawaran Maroko juga telah ditolak sejak awal oleh PBB dan Uni Afrika. Pandangan juridis para pakar hukum internasional menyatakan bahwa penerimaan terhadap rencana otonomi, akan berarti untuk pertama kalinya sejak ratifikasi Piagam PBB, masyarakat internasional memberi pengesahan terhadap "*...expansion of a country's territory by military force*". Berbagai pendapat juga menyatakan bahwa apabila penduduk Sahara Barat menerima perjanjian otonomi sebagai hasil referendum yang bebas dan terbuka,

hal itu juga berarti terpenuhinya azas dasar bagi penentuan nasib sendiri (*legitimate act of self-determination*).³²

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Maroko, Taib Fassi Fihri, menyatakan bahwa Maroko berniat untuk menyampaikan usulan otonomi atas Sahara Barat ke PBB. Dikatakan bahwa otonomi merupakan satu-satunya alternatif (titik temu) yang dapat diterima pihak-pihak terkait.

Menteri Fihri menyatakan bahwa tugas Utusan Khusus Sekjen PBB, Peter van Walsum, terfokus pada upaya pencarian solusi bagi kebuntuan yang terjadi dalam penyelesaian isu Sahara Barat, seraya menegaskan bahwa untuk mengatasi kebuntuan tersebut Maroko siap melakukan negosiasi mengenai otonomi atas Sahara Barat. Maroko juga tidak berniat melakukan negosiasi mengenai Sahara Barat di luar kerangka PBB, namun melalui penyelesaian sesuai dengan legalitas internasional.

Pada tanggal 25 September 2005, Wap Maroko, Mohammed Bennouna, menyampaikan surat tertulis kepada ketua DK PBB mengenai perkembangan isu Sahara Barat sejak diberlakukannya gencatan senjata antara Maroko dan Polisario pada September 1991. Dalam surat tersebut ditegaskan mengenai pentingnya penyelesaian isu Sahara Barat secara politis yang dapat diterima seluruh pihak di bawah kerangka PBB.

Wilayah Sahara Barat sangat menggiurkan karena kaya akan sumber mineralnya yaitu fosfat dan minyak di Bou Craa, begitu pula dengan perairannya sangat bagus untuk eksploitasi ikan di lepas pantai. Tidak salah jika wilayah

³² RR-015/RABAT/II/2008 tgl 12 Februari 2008

tersebut selalu menjadi incaran Negara-negara lainnya karena tergiur dengan kekayaan alamnya. Maroko salah satunya yang telah mendapatkan dukungan dari 25 negara. Perundingan demi perundingan yang telah dilaksanakan tidak membuat Maroko menerima begitu saja solusi di luar kerangka kesatuan wilayah dan kedaulatannya. Walaupun Front Polisario telah menerima usulan Baker Plan, hal ini ditolak oleh Maroko dengan alasan keamanan. Alasan lain, hasil Baker Plan tidak akan menguntungkan bagi Maroko. Masalah Sahara Barat juga merupakan isu yang seringkali memperburuk hubungan Maroko dengan Aljazair yang mendukung Front Polisario.

Dubes Maroko menemui Direktur Timur Tengah RI dengan tujuan utamanya yaitu untuk menyampaikan secara langsung nota diplomatik no. 306/06 tgl. 27 Maret 2006 Kedubes Maroko di Jakarta mengenai pidato Raja Kerajaan Maroko His Majesty Mohammed VI pada tgl. 25 Maret sewaktu berkunjung ke 3 (tiga) provinsi di Sahara Barat.

Secara singkat Dubes Maroko menjelaskan isi dari pidato Raja Kerajaan Maroko His Majesty Mohammed VI tersebut yaitu :

- a. Dalam kunjungannya ke 3 (tiga) provinsi di Sahara tersebut, Raja Kerajaan Maroko mengumumkan penunjukkan anggota baru the Royal Advisory Council for Saharan Affairs (CORCAS) yang dibentuk pada bulan Nopember 2005 yang beranggotakan pemuka masyarakat dan pejabat terpilih lainnya.
- b. Melalui CORCAS, dialog antara partai-partai politik dan wakil-wakil dari penduduk di Sahara akan menghasilkan proposal mengenai pemberian otonomi kepada wilayah Sahara sebagai penyelesaian akhir masalah Sahara

yang akan disampaikan oleh Maroko kepada Dewan Keamanan PBB. Proposal dimaksud merupakan cara paling terbaik untuk mempertahankan keutuhan dan kesatuan Kerajaan Maroko dan membangun provinsi-provinsi Sahara dengan optimal. Dubes Maroko menyampaikan bahwa langkah pemberian otonomi kepada Sahara tersebut adalah mencontoh upaya yang dilakukan Indonesia terhadap penyelesaian Aceh.

- c. CORCAS merupakan Badan Forum konsultasi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sebagai wadah dialog dan konsultasi dari pihak-pihak yang mewakili semua komponen masyarakat di seluruh provinsi di Sahara.
- d. Raja Kerajaan Maroko mengharapkan agar CORCAS mengupayakan kembalinya penduduk Sahara yang masih berada di kamp pengungsian di Tindouf, wilayah Aljazair dan mereka mendapat jaminan kebebasan dan kehormatan yang mereka inginkan untuk berkontribusi membangun negara mereka (Maroko).
- e. Sejak UN berkesimpulan bahwa UN Settlement Plan tidak dapat diimplementasikan di Sahara, terbukti bahwa diperlukan negosiasi dan penyelesaian politik yang dapat diterima semua pihak. Menanggapi hal tersebut, dengan dukungan dari masyarakat internasional dan UN, Maroko bersedia membantu mencari penyelesaian secara politis yang mendorong masyarakat Sahara mengelola wilayah mereka sendiri dalam kerangka keutuhan dan kesatuan Kerajaan Maroko. Penyelesaian secara politis tersebut, tidak hanya berkontribusi terhadap munculnya kekuatan baru Arab Maghreb

berdasarkan kerjasama namun juga memperkuat perdamaian dan stabilitas regional.

Dubes Maroko menyinggung bahwa Aljazair hingga saat ini tidak memberikan tanggapan yang positif terhadap penyelesaian masalah Sahara. Berkaitan dengan hal tersebut, Dubes Maroko mengharapkan dukungan Indonesia untuk melakukan pendekatan kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB, agar mendukung proposal tersebut diatas yang akan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB.

Dubes Maroko meminta bantuan Kementerian Luar Negeri RI, untuk menyampaikan nota diplomatik mengenai hal yang sama kepada Ditjen Multilateral. Menanggapi permintaan Dubes Maroko tersebut, Kemlu RI menyampaikan akan mempertimbangkan permohonan dukungan tersebut dan meneruskan nota diplomatik yang ditujukan kepada Ditjen Multilateral.

Posisi Indonesia terhadap masalah Sahara, Indonesia harus hati-hati dalam menentukan posisinya, mengingat hubungan baik yang harus dijaga dengan Aljazair dan Maroko. Masalah Sahara merupakan urusan dalam negeri Maroko dan Indonesia tidak ikut campur dan mendukung penyelesaian damai di bawah kerangka PBB.

Apabila terdapat ketidaksepakatan dari Aljazair dan Maroko terhadap suatu draft resolusi di PBB, PTRI New York mengusulkan untuk abstain, terutama bila terjadi *voting*. Namun dengan penjelasan selanjutnya bahwa Indonesia mendukung penerapan *self determination* bagi wilayah yang belum berpemerintahan serta tetap memajukan semangat dialog ketimbang *voting*.

Dalam perkembangan terakhir, posisi abstain tersebut menyulitkan hubungan Indonesia dengan Aljazair yang menyusun draft resolusi baru pada Sidang Komite IV SMU PBB ke-59 tanggal 18 Oktober 2004 di New York. Dubes RI Alger telah dipanggil oleh Kemlu Aljazair yang menyatakan kekecewaannya karena Indonesia telah abstain dalam *voting* draft resolusi tersebut dan meminta Indonesia untuk mempertimbangkan posisinya.

Di sisi lain, Dubes RI Rabat dengan fax. no. RR-113/Rabat/XI/04 mengusulkan agar Indonesia tetap berpegang pada posisi abstain dengan beberapa alasan, antara lain sikap positif Maroko terhadap Indonesia baik masalah Timor Timur (dulu) maupun dukungan Maroko terhadap keanggotaan *Council of Administration* dan *Postal Operation Council* dan Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Usulan Dubes RI Rabat tampak lebih rasional dan wajar untuk dipertimbangkan.

Pada tanggal 10 Desember 2004, SMU PBB ke-59 telah menyelesaikan pembahasan Resolusi mengenai Sahara dengan *voting* 50 suara menyetujui, tidak ada suara menolak dan 100 suara abstain, termasuk Indonesia. Sikap Indonesia tetap pada posisi mendukung usaha-usaha PBB dengan peran serta dari seluruh pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah Sahara secara adil dan diterima oleh semua pihak.

C. Eskalasi Konflik

Ketegangan yang terjadi antara Front Polisario dengan Maroko muncul pada tahun 2004-2005 dan dapat teratasi dengan utusan sekjen PBB Mr. Alvaro

De Soto menggantikan James Baker yang mundur pertengahan tahun 2004 sebagai utusan khusus PBB mengenai masalah Sahara Barat. Mundurnya Baker diperkirakan antara lain karena tidak mampu mencapai kemajuan berarti selama tujuh tahun dalam tugasnya tersebut, serta frustrasi akan sikap Maroko yang kurang kooperatif terhadap implementasi Baker Plan I dan II. Serta telah memakan korban lebih dari 100 jiwa penduduk Sahrawi.

Dalam konferensi pers di New York tanggal 26 Juli 2005, jubir Sekjen PBB, Stephan Dujaric menyampaikan bahwa Kofi Annan telah resmi menunjuk Peter van Walsum, seorang diplomat Veteran dari Belanda, sebagai Utusan Pribadi Sekjen PBB untuk Sahara Barat menggantikan Alvaro de Soto. Misi utamanya adalah meneruskan upaya PBB, yaitu melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait di kawasan untuk mencari penyelesaian politik atas konflik Sahara Barat sesuai dengan Resolusi DK PBB 1598 tanggal 25 April 2005.

Pada tanggal 8 September 2005, Sekjen PBB Kofi Annan juga telah menunjuk Jenderal Court Mouzcard sebagai komandan baru Misi Perdamaian Sahara Barat (MINURSO) yang mulai bertugas di wilayah tersebut tanggal 12 September 2005.

14 Desember 2006 voting terhadap resolusi Algeria di Sidang Majelis Umum PBB. Resolusi tersebut gagal, dimana seluruh negara Arab dan negara Islam, mayoritas negara-negara Afrika, negara-negara Eropa dan Amerika Latin menolak mendukung resolusi tersebut.

15 Oktober 2007, Komite IV (*Special Political and Decolonization Committee*), SMU PBB ke-62, mengesahkan resolusi mengenai Sahara Barat

tanpa pemungutan suara. Resolusi ini memuat elemen-elemen baru yang terkait dengan resolusi DK no. 1754 (2007) dan perundingan langsung yang telah dimulai antara Maroko dan Front Polisario, dengan inti-inti sbb:³³

- a. mendukung resolusi 1754 (2007)
- b. menyambut baik perundingan antar pihak yang difasilitasi PBB pada bulan Juni dan Agustus 2007, dan
- c. menghargai upaya Sekjen PBB dan Utusan Pribadi-nya untuk mengimplementasikan resolusi 1754, serta mendorong para pihak untuk terus menunjukkan *political will* dan semangat kerjasama untuk menciptakan suasana bagi keberhasilan perundingan tersebut.

19 Oktober 2007, Sekjen PBB menyampaikan laporan mengenai Sahara Barat yang mencakup periode sejak laporan terakhir tertanggal 13 April 2007 hingga kini. *Assessment* Personal Envoy Sekjen PBB mengenai dua kali perundingan yang telah berlangsung adalah bahwa para pihak belum dapat membahas substansi karena dua kendala utama, yaitu perbedaan penafsiran prinsip "*self-determination*" untuk rakyat Sahrawi dan penerapan prinsip "*without pre-conditions*" dalam perundingan. Personal Envoy terus mendorong para pihak untuk memasuki pembahasan substantif semua proposal yang ada berdasarkan prinsip "*nothing is agreed until everything is agreed*".³⁴

Laporan Sekjen PBB No.S/2007/202 hanya memuat rujukan faktual usulan dari pihak Maroko dan Front Polisario namun tidak dimasukkan dalam

³³ BB-449/PTRI-NEWYORK/X/07 di Jakarta, tgl 16 Oktober 2007, Resolusi yang dikeluarkan PBB kepada Front Polisario dan Maroko.

³⁴ Surat Kawat no. 08/ag/02/08 Maroko di Jakarta tgl 12 Februari 2008, mengenai Resolusi yang dikeluarkan PBB kepada Front Polisario dan Maroko.

rekomendasi Sekjen PBB kepada DK-PBB karena Sekjen PBB konsisten dalam pandangan bahwa DK PBB perlu menyerukan kepada pihak yang bertikai untuk kembali kepada perundingan tanpa prasyarat. Dalam usulan pihak Maroko, prakarsa mengenai paket otonomi mengandung prasyarat yaitu '*presumption*' bahwa Sahara barat telah berada di bawah kedaulatan Maroko. Sedangkan prakarsa Front Polisario mengandung prasyarat mengenai parameter untuk perundingan yaitu harus mencakup penyelesaian melalui referendum dengan opsi merdeka. Sekjen PBB enggan untuk memainkan peran yang *visible* untuk menjembatani perbedaan mendasar dari kedua pihak yang bertikai karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Sekjen PBB cenderung mengambil jarak dan memberikan tanggung jawab lebih kepada para pihak yang bersengketa untuk memulai lagi perundingan secara langsung tanpa prasyarat.

Pada tanggal 30 April 2007, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan resolusi mengenai Sahara Barat secara aklamasi. Resolusi dengan kode S/2007/238 pada intinya berisi perpanjangan mandat MINURSO hingga 6 bulan ke depan serta menyerukan kepada para pihak untuk memulai lagi negosiasi tanpa syarat dan meminta Sekjen PBB untuk menyelenggarakan negosiasi tersebut dan melaporkan kepada DK PBB dalam dua bulan mengenai status dan kemajuan dalam upayanya tersebut.³⁵ Utusan Pribadi Sekjen PBB untuk urusan Sahara Barat, Peter van Walsum direncanakan tanggal 11 Juli 2007 akan

³⁵ Brafaks PTRI New York No. di Jakarta RR-318/PTRI NEW YORK/IV/07 tanggal 30 April 2007, mengenai Resolusi yang dikeluarkan PBB kepada Front Polisario dan Maroko.

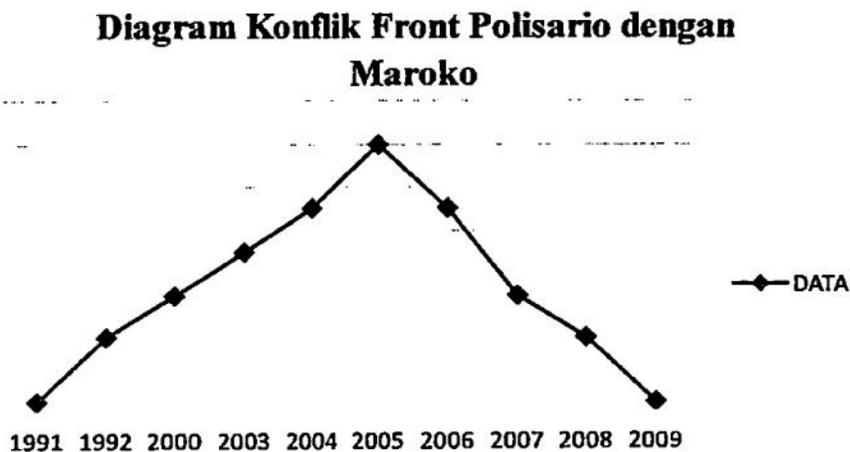
mempresentasikan di depan DK PBB mengenai perkembangan status dan kemajuan perundingan mengenai Sahara Barat.³⁶

Pokok-pokok isi laporan tersebut antara lain:

1. Upaya Sekjen PBB dalam melaksanakan tugas yang diberikan DK diantaranya memfasilitasi pertemuan pihak yang bersengketa, Maroko dan Front Polisario, dan Negara tetangga yang berkepentingan, Aljazair dan Mauritania tanggal 18 – 19 Juni 2007 di Manhasset, New York. Sebelumnya, Peter van Walsum telah melakukan konsultasi-konsultasi secara terpisah dengan kedua pihak yang bersengketa dan Negara-negara yang berkepentingan.
2. Pertemuan tersebut merupakan perundingan langsung antara kedua pihak yang pertama kali setelah gagalnya perundingan langsung di London dan Berlin tahun 2000. Pertemuan berlangsung dalam *positive atmosphere* dimana kedua pihak menunjukkan sikap terbuka dan *respectful*. Walaupun kedua pihak sepakat mengenai prinsip *self determination*, namun masing-masing sangat berbeda dalam penafsiran prinsip tersebut. Kedua pihak sepakat melanjutkan negosiasi langsung tersebut pada minggu kedua Agustus 2007.

³⁶ Brafaks PTRI New York di Jakarta ,No. RR-534/PTRI-NEWYORK/VII/07 tanggal 6 Juli 2007, mengenai Laporan Peter van Walsum kepada Sekjen PBB.

Gambar 4. Diagram Konflik Front Polisario dengan Maroko 1991 – 2009.



Sumber : dari berbagai sumber

Rangkaian negosiasi langsung yang kedua antara pihak-pihak (Maroko, Aljazair, Mauritania dan Front Polisario) telah berlangsung pada 10 – 11 Agustus 2007 di Manhasset, New York. Dalam pertemuan itu para pihak tetap mempertahankan posisinya masing-masing sehingga tidak mengalami kemajuan yang berarti dalam usaha penyelesaian konflik. Namun demikian, Maroko berinisiatif mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan negosiasi langsung putaran ketiga pada waktu dan tempat yang akan disepakati melalui konsultasi dengan Utusan Khusus, Peter Van Walsum.³⁷

Perundingan putaran ketiga yang dihadiri oleh Maroko, Polisario, Aljazair, dan Mauritania tersebut memfokuskan pada pengimplementasian Resolusi DK PBB No. 1754 dan 1783 yang menyatakan bahwa PBB menyerukan kepada

³⁷ Press Release KB Maroko di Jakarta tanggal 13 Agustus 2007, berita negosiasi langsung antar Front Polisario dengan Maroko

kedua pihak terkait konflik Sahara agar melakukan perundingan yang didasarkan pada itikad baik dan tanpa syarat. Dalam perundingan ini kedua belah pihak masih menunjukkan perbedaan persepsi terutama mengenai hal-hal yang bersifat fundamental. Kedua belah pihak tidak menyetujui pelaksanaan *confidence building measure* namun hanya dalam tahap pendiskusian. Akan tetapi kedua pihak memiliki rencana untuk mengadakan pertemuan pendahuluan yang membahas mengenai masalah administrasi, kompetensi dan alat-alat pemerintahan. Disepakati pula bahwa Maroko dan Polisario (didukung Aljazair) akan mengadakan perundingan putaran ke empat pada tanggal 11 – 13 Maret 2008.

Utusan Khusus PBB untuk masalah Sahara Barat, Peter Van Walsum melakukan kunjungan pada tanggal 6 - 14 Februari ke negara-negara Magribi sebagai persiapan negosiasi langsung para pihak yang bertikai putaran ke-4 bulan Maret 2008 pada dasarnya ditujukan untuk melunakkan "blockade attitude" para pihak dan meluruskan kembali niat masing-masing dalam negosiasi. Peter Van Walsum menyimpulkan kemungkinan bagi penyelesaian konflik Sahara Barat dalam waktu dekat masih belum memungkinkan. Dari pembicaraan dengan para pihak yang terlibat, dia menyatakan kecewa karena sejauh ini belum ada jaminan terlaksananya negosiasi yang lebih substansial pada putaran ke-4 yang akan diselenggarakan bulan Maret 2008 di Manhasset. Sumber terbuka di Rabat mengungkap dokumen *confidential* yang dirilis NATO mengenai Sahara barat dan Polisario menyebutkan bahwa dukungan historis Aljazair bagi front Polisario lebih dilatarbelakangi kepentingan hegemoni di kawasan Magribi daripada

persaingan ideologis. Dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa terbentuknya negara Sahrawi (SADR) yang berdaulat di Sahara Barat akan sangat membantu upaya Aljazair menghambat ambisi Maroko menjadi negara paling berkuasa di kawasan Magribi.³⁸

Sumber terbuka di Maroko tanggal 28 Februari 2008 memberitakan bahwa Front Polisario telah memperingati lahirnya Republik Sahara (SADR) yang dideklarasikan tanggal 27 Februari 1976. Peringatan diselenggarakan di Tifariti yang merupakan *buffer zone* sejak 1991 serta dihadiri anggota Polisario terutama dari Aljazair dan Spanyol.

Lebih dari 100 (seratus) orang Sahara keturunan Maroko meninggalkan kamp Tindouf dan tiba di El Karkrat, Maroko melalui program repatriasi PBB pada tanggal 27 Februari 2008. Diantara mereka terdapat sejumlah tokoh yang menghadiri Kongres ke-12 Polisario di Tifariti bulan Desember 2007 lalu.

Pada 14 April 2008, Sekjen PBB mengeluarkan laporan terbaru mengenai Sahara Barat (S/2008/251). Laporan tersebut mencakup pelaksanaan mandat MINURSO sejak tanggal 19 Oktober 2007 hingga kini dan status perundingan mengenai Sahara Barat sejak laporan Sekjen PBB tertanggal 25 Januari 2008 hingga sekarang.

Pelaksanaan mandat MINURSO:

1. Situasi di Sahara Barat dalam periode laporan secara umum dapat dikatakan tenang. Namun dicatat beberapa kali ketegangan yang timbul terkait pelaksanaan kongres ke-12 Polisario bulan Desember 2007 di Tifariti,

³⁸ (vide brafaks KBRI Rabat di Jakarta No. RR-010/RABAT/II/08 tanggal 6 Februari 2008), mengenai Laporan Peter van Walsum kepada Sekjen PBB.

pemilihan anggota "Parlemen" Sahara Barat dan peringatan 32 tahun pembentukan SADR di Tifariti, bulan Februari 2008, rencana "Peace March" oleh NGO Association Sahara Marocain bulan Januari-Maret 2008 yang akhirnya dibatalkan, serta latihan militer angkatan bersenjata Maroko di sekitar Awsard pada bulan Februari 2008.

2. Sekjen PBB merekomendasikan perpanjangan mandat MINURSO selama 6 bulan.

Status Perundingan:

1. Fokus adalah kunjungan Peter van Walsum ke kawasan tanggal 5-15 Maret 2008, dan pelaksanaan perundingan Manhasset IV tanggal 16-18 Maret 2008.
2. Kunjungan ke kawasan oleh Van Walsum dilaksanakan berdasarkan Press Statement Presiden DK tertanggal 4 Februari 2008, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan perundingan putaran ke-4.
3. Sekjen PBB merekomendasikan DK untuk mengulangi himbauannya kepada para pihak yang bertikai untuk segera memasuki fase perundingan yang lebih substantif dan intensif tanpa prasyarat.³⁹
4. Pada konsultasi 21 April 2008, van Walsum menyatakan bahwa tidak ada tekanan bagi Maroko untuk meninggalkan klaim kedaulatannya atas Sahara Barat, dan karena itu gagasan Sahara Barat yang merdeka bukan merupakan preposisi yang realistis.⁴⁰

³⁹ Surat Kawat Maroko di Jakarta no. 08/ag/02/08 tgl 12 Februari 2008, mengenai Resolusi yang dikeluarkan PBB.

⁴⁰ RR-010/RABAT di Jakarta/II/08 tgl 6 Februari 2008, mengenai Resolusi yang dikeluarkan PBB.

Resolusi Sahara Barat dibahas pada tingkat expert tanggal 25 April 2008. Resolusi dirancang oleh Group of Friends (AS, Inggris, Perancis dan Rusia) dan memperpanjang mandat MINURSO selama 1 tahun. Resolusi tidak memuat pernyataan Van Walsum yang kontroversial (21 April 2008), namun memuat assessment Van Walsum yang didukung oleh Sekjen PBB yaitu “penolakan status quo” dan “realisme dan semangat kompromi”. Resolusi tersebut mendapat dukungan penuh dari Maroko, namun ditolak oleh Aljazair yang menginginkan penghapusan kata “realisme” yang dianggap memihak posisi Maroko.⁴¹

Rancangan resolusi disahkan secara aklamasi pada tanggal 30 April 2008, setelah melalui proses yang sulit terutama antara pihak sponsor dengan Costa Rica, Afrika Selatan, dan Panama. Sempat terjadi ketegangan antara Rusia dan Costa Rica karena keinginan Costa Rica untuk meminta pemungutan suara atas usulan-usulan amandemennya, dan karena ancaman ‘technical veto’ oleh Rusia.⁴²

Pada akhir Mei 2008, terdapat indikasi eskalasi ketegangan di Sahara Barat dengan mobilisasi sekitar 10.000 pasukan militer Maroko ke daerah perbatasan Selatan. Maroko juga telah meningkatkan anggaran militernya hingga mencapai 46% dari APBN.⁴³ Dalam kurun waktu tiga bulan antara September-November 2008, tiga negara yaitu Malawi, Vanuatu dan Paraguay

⁴¹ Surat Kawat Maroko di Jakarta no. 08/ag/02/08 tgl 12 Februari 2008, Resolusi yang dikeluarkan Sahara Barat.

⁴² Surat Kawat Maroko di Jakarta no. 08/ag/02/08 tgl 12 Februari 2008, mengenai pemungutan suara

⁴³ RR-042/RABAT di Jakarta /V/2008 tanggal 22 Mei 2008, mengenai Anggaran Maroko.

menarik pengakuannya atas *Republique Arabe Sahraoui Democratique (RASD)* dan memutuskan hubungan resmi.⁴⁴

Mediasi yang difasilitasi DK PBB gagal mencapai kesepakatan antara opsi otonomi yang ditawarkan Maroko dengan opsi referendum yang diinginkan Polisario. Peter van Walsum yang selama tiga tahun lebih telah menjadi mediator PBB dalam perundingan sengketa Sahara Barat telah melepas tugasnya. Belum ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan, juru bicara PBB pada *press briefing* tanggal 28 Agustus 2008 hanya mengindikasikan bahwa Van Walsum tidak lagi ditugaskan sebagai Utusan Khusus PBB untuk Sahara Barat. Utusan Khusus yang baru akan diumumkan dalam waktu dekat. Terdapat dugaan bahwa pengakhiran tugas ini dikarenakan kemarahan Polisario akibat komentar Van Walsum yang mendukung Maroko.

Tanggal 7 Januari 2009 Sekjen PBB Ban Ki Moon mengumumkan Christopher Ross sebagai Personal Envoy Sekjen PBB untuk masalah Sahara Barat. Ross adalah diplomat karier dari US yang jabatan terakhirnya Senior Adviser for the Middle East and North Africa untuk Perwakilan US di PBB.

Kunjungan Utusan Khusus PBB untuk Masalah Sahara Barat, Mr. Christopher Ross, ke Aljazair tanggal 21 - 23 Februari 2009, setelah sebelumnya mengunjungi Maroko pada 18 - 19 Februari 2009. Tanggal 20 Februari mengunjungi kamp pengungsi rakyat Sahara Barat di Smara (wilayah Sahara Barat yang dikuasai Front Polisario). Ini merupakan kunjungan pertamanya sejak menjadi Utusan Khusus.

⁴⁴ RR-110/ALGER di Jakarta /XII/08 tgl 10 Desember 2008, mengenai negara yang menarik pengakuannya terhadap SADR.

Tanggal 21 Februari Ross mengunjungi kamp Tindouf dan bertemu Mohammed Abdelaziz yang menegaskan kembali: kesiapannya berunding dengan naungan PBB tanpa syarat front Polisario satu-satunya wakil sah rakyat Sahara Barat.

Dalam konferensi pers, Ross menyatakan: dalam lawatan ini pihaknya melihat adanya keinginan jujur dari kedua pihak yang bertikai dan Aljazair untuk mendukung upaya penyelesaian di bawah naungan PBB pertemuan telah membahas secara mendalam, bermanfaat dan terus terang sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai posisi masing-masing pihak akan melanjutkan lawatan ke Madrid, Paris dan Washington guna membahas kontribusi yang dapat diberikan untuk memperlancar sidang putaran Manhasset putaran ke-5.

Kedutaan Maroko di Jakarta mengirimkan nota diplomatik kepada Direktorat Multilateral Kementerian Luar Negeri RI berkaitan dengan pertemuan *Special Committee on Decolonization (Committee of 24)* tanggal 12-14 Mei 2009 yang intinya meminta agar Indonesia mendukung upaya Sekjen PBB dan Utusan Khususnya untuk mengupayakan negosiasi di antara pihak-pihak yang bertikai dan juga mendukung upaya Maroko untuk mengupayakan otonomi bagi wilayah-wilayah yang dipertikaikan.⁴⁵

D. Dampak-Dampak Konflik

Upaya-upaya yang dilakukan Maroko untuk mendapatkan Sahara Barat seutuhnya yaitu dengan mencuri sumber daya alam dan memisahkan penduduk

⁴⁵ Nota Diplomatik No.408/09, Embassy of the Kingdom of Morocco, di Jakarta, mengenai Maroko meminta dukungan Indonesia.

Sahara Barat dengan keluarganya, dengan 2.700 km dinding pasir, yang dijajari pos militer dan ranjau-ranjau, dan telah menyebabkan korban 100 lebih jiwa rakyat Sahara Barat.

Dengan adanya pencurian sumber daya alam dan memisahkan keluarga dengan 2.700 km dinding pasir menyebabkan kerugian materil dan non materil. Kerugian secara materil, banyaknya bangunan-bangunan di Sahara Barat yang hancur. Sedangkan kerugian non materil memberi dampak pada mental. Warga Sahrawi telah mengalami masa-masa sulit dan penekanan oleh Maroko. Tidak hanya sampai disitu, bahkan konflik-konflik antar negara yang terjadi antara tahun 1991-2007 menyebabkan korban sekitar 100 ribu lebih jiwa warga Sahrawi dan 170 ribu orang menjadi pengungsi.

Menurut majalah mingguan Maroko, "*Jeune Afrique Intelligent*", dalam edisi 16 Maret 2005 mengatakan bahwa jumlah negara yang mengadakan hubungan diplomatik dengan RDAS mengalami penurunan sangat tajam, yaitu dari 76 negara pada 1995 menjadi 49 negara. Negara terakhir yang menarik pengakuannya atas RDAS adalah Madagaskar pada tanggal 6 April 2005.

Bulan September 2008 Republik Malawi telah memutuskan untuk menarik pengakuannya terhadap SADR dan memutuskan hubungan resminya.

Kurang dari tiga bulan berikutnya Vanuatu juga mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat dan menegaskan dukungannya kepada Sekjen PBB untuk mencari penyelesaian politik terhadap perselisihan tersebut. Pada minggu yang sama Paraguay menegaskan kembali bahwa penarikan pengakuannya terhadap SADR sejak Februari 2000 tetap tidak berubah.

Pengaruh jangka panjang dengan adanya penjajahan Maroko menyebabkan ratusan pekerja menjadi pengangguran akibat hancurnya bangunan-bangunan di Sahara Barat. Penyerangan yang berulang-ulang terhadap wilayah Sahara Barat menyebabkan kerusakan dimana-mana dan hubungan yang telah dijalin dengan beberapa negara menjadi tidak baik. Walaupun Sahara Barat kaya akan fosfat, minyak dan ikan diperairannya, namun saat ini Sahara Barat merupakan negara miskin dengan angka pengangguran tertinggi di Benua Afrika.

Beberapa negara memberikan masukan terhadap penyelesaian konflik di Sahara Barat antara Front Polisario dengan Maroko. Seperti Maroko, Aljazair, Afrika Selatan, Perancis, AS, Jepang, China, KBRI Alger.

Maroko melalui beberapa perwakilannya, telah meminta dukungan Indonesia atas rencana pemberian status otonomi sebagai upaya Maroko dalam penyelesaian konflik Sahara. Maroko juga menyampaikan ucapan terima kasih atas posisi abstain Pemerintah RI dalam pemungutan suara mengenai Sahara Barat pada Sidang Umum PBB bulan Desember 2006.⁴⁶

Aljazair menyatakan kekecewaannya atas posisi abstain Pemerintah RI pada pemungutan suara rancangan resolusi Sahara Barat, karena posisi tersebut dianggap sebagai dukungan terhadap Maroko. Aljazair menegaskan bahwa tidak ada alternatif lain untuk masalah Sahara Barat selain melalui proses dekolonisasi.⁴⁷ Aljazair menegaskan bahwa penyelesaian terbaik hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang telah diputuskan oleh DK PBB sebagaimana tertuang dalam berbagai resolusi mengenai Sahara Barat, terutama

⁴⁶ RR-015/RABAT di Jakarta/II/2008 tgl 12 Februari 2008, Maroko meminta dukungan Indonesia dalam penyelesaian konflik.

⁴⁷ *Ibid*

resolusi 1495 (2003) yang mempertegas upaya penyelesaian melalui “*peace plan for self determination*” atau “*Baker plan*”.⁴⁸ Posisi Aljazair dalam isu Sahara Barat didasarkan pada 3 aspek yakni: the principle of self-determination; the settlement plan; dan the Baker Plan II.⁴⁹

Afrika Selatan mendukung hak Sahrawi untuk melaksanakan *self-determination*. Pada adopsi resolusi 1783 tanggal 31 Oktober 2007, Afrika Selatan menyesalkan tidak adanya rujukan mengenai pelanggaran HAM oleh Maroko dalam resolusi tersebut. Afrika Selatan juga menyampaikan keprihatinannya bahwa proses perundingan rancangan resolusi tidak transparan dan eksklusif, serta terdapat upaya tertentu untuk membelokkan resolusi 1754 terutama dengan berupaya menempatkan usulan penyelesaian dari satu pihak lebih tinggi dari usulan pihak lainnya.⁵⁰

Perancis dan AS beranggapan bahwa rencana Maroko untuk memberikan otonomi pada Sahara Barat sebagai sesuatu yang konstruktif.⁵¹ Sikap AS kembali ditegaskan pada tahap ketiga perundingan Manhasset dengan menyatakan bahwa proposal otonomi Maroko sebagai “*a serious and credible option*”.⁵²

Front Polisario tidak dapat menerima usulan Maroko mengenai otonomi di Sahara Barat dan masih berposisi untuk pengadaan referendum dengan tiga opsi, yaitu merdeka, integrasi dengan Maroko, atau otonomi di dalam Maroko.⁵³

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ RR-015/RABAT di Jakarta/II/2008 tgl 12 Februari 2008, mengenai dukungan Afrika Selatan terhadap Sahara Barat.

⁵¹ RR-015/RABAT di Jakarta/II/2008 tgl 12 Februari 2008 & RR-015/RABAT/II/2008 tgl 12 Februari 2008, mengenai dukungan Perancis terhadap otonomi Maroko.

⁵² RR-015/RABAT di Jakarta /II/2008 tgl 12 Februari 2008, mengenai dukungan AS terhadap otonomi Maroko.

⁵³ *Ibid*

Polisario juga menyatakan bahwa macetnya negosiasi Manhasset dikarenakan penolakan Maroko atas resolusi 1754 dan 1783.⁵⁴

Jepang mendukung penyelesaian damai melalui negosiasi dalam masalah Sahara Barat di bawah kerangka PBB. Jepang juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas dan kerjasama yang erat antar negara di kawasan Maghribi (Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, dan Libya).⁵⁵

China mendukung penuh “*any useful actions and initiatives*” untuk mempercepat penyelesaian damai yang diterima semua pihak yang terlibat dalam konflik Sahara. Posisi dasar China dalam masalah Sahara adalah sepenuhnya didasarkan pada resolusi PBB mengenai masalah ini, dan bahwa penyelesaian yang tertunda akan berdampak merugikan bagi stabilitas dan pembangunan di wilayah Sahara serta persatuan dan solidaritas antar negara di sekitarnya, bahkan seluruh Afrika.⁵⁶

KBRI Alger melaporkan bahwa Aljazair menyambut baik adopsi resolusi 1813 dengan menilai bahwa posisi DK PBB mengenai Sahara Barat tetap konsisten dan menyambut baik syarat-syarat penyelesaian yang tetap menekankan kembali hak-hak rakyat Sahrawi untuk menentukan nasib sendiri / *self-determination*.

Sebagai negara tetangga, Aljazair melihat konflik sebenarnya dapat diselesaikan lebih cepat lagi. Aljazair menawarkan diri untuk membantu kedua pihak guna mencapai suatu solusi politik yang adil, permanen dan bisa diterima

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ RR-015/RABAT di Jakarta /II/2008 tgl 12 Februari 2008, mengenai dukungan China terhadap Resolusi PBB.

kedua pihak berdasarkan hak-hak rakyat Sahrawi dalam menentukan nasib sendiri. Pada saat yang sama Aljazair juga menegaskan bahwa akan ada solusi dengan cara menghormati hak-hak rakyat Sahrawi untuk mengadakan referendum for self-determination secara bebas sesuai Piagam PBB dan prinsip-prinsip dekolonisasi.⁵⁷

Adopsi resolusi 1813 juga disambut baik oleh Maroko yang menilai seruan sekaligus perpanjangan mandat MINURSO sebagai "a new and important step" yang menegaskan perlunya penyegaran dalam evolusi penyelesaian masalah Sahara sejak tahun lalu.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*